



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PROGRAM SKRINING KESEHATAN NASIONAL: UPAYA DAN TANTANGAN

**Rahmi Yuningsih**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[rahmi.yuningsih@dpr.go.id](mailto:rahmi.yuningsih@dpr.go.id)

**Eva Mutia Ghofarany**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[eva.ghofarany@dpr.go.id](mailto:eva.ghofarany@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan hipertensi masih menjadi tantangan utama pada sektor kesehatan. Dari segi prevalensi dan angka kematian, PTM menempati peringkat tertinggi dibandingkan jenis penyakit lainnya. PTM juga membutuhkan biaya kesehatan yang besar. Pada tahun 2023, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk penyakit jantung sebesar Rp17,6 triliun, kanker Rp5,9 triliun, dan stroke Rp5,2 triliun. Menurut Gindo Tampubolon, peneliti University of Manchester, Indonesia memiliki potensi mengurangi beban ekonomi hingga US\$1,3 triliun (sekitar Rp16.900 triliun) melalui upaya penurunan angka kematian akibat PTM. Namun, tanpa tindakan yang memadai hingga tahun 2035, beban ekonomi yang ditimbulkan PTM diproyeksikan dapat mencapai US\$5,4 triliun (sekitar Rp70.200 triliun).

Sebagai langkah antisipatif, mulai tahun 2025 Kementerian Kesehatan akan meluncurkan program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan pada aspek kuratif serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui deteksi dini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk pelaksanaan program ini.

Program ini berbeda dari skrining JKN yang mencakup 14 jenis penyakit. Skrining ulang tahun ini dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai golongan usia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas deteksi dini serta meminimalkan risiko kematian dan kecacatan. Program skrining ini akan dibagi berdasarkan kategori usia, yaitu anak balita, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk skrining pada anak balita, fokus pemeriksaan ditujukan pada deteksi dini penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital. Skrining pada remaja di bawah usia 18 tahun mencakup pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Skrining untuk usia dewasa akan difokuskan pada deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan kanker serviks, yang merupakan penyebab utama kematian pada perempuan di Indonesia. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mendeteksi kanker prostat pada laki-laki. Sementara itu, skrining untuk lansia, seperti deteksi dini alzheimer, dan osteoporosis.

Masyarakat direncanakan dapat mengakses layanan skrining ini di Puskesmas atau rumah sakit tergantung pada jenis pemeriksaan yang dibutuhkan. Saat melakukan pemeriksaan, masyarakat diharapkan membawa Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas untuk anak sebagai bentuk verifikasi data melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Dalam implementasinya, pemerintah perlu memerhatikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang masih belum merata. Pada tahun 2023, dari 10.374 Puskesmas di seluruh Indonesia, baru 88,2% yang terakreditasi. Selain itu, setiap Puskesmas diwajibkan memiliki minimal sembilan tenaga kesehatan standar. Namun, hingga akhir tahun 2022, hanya 56,1% Puskesmas yang memenuhi standar tersebut. Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah distribusi tenaga kesehatan. Pada tahun 2021, di DKI Jakarta terdapat satu dokter untuk 680 penduduk, sementara di Sulawesi Barat, perbandingannya mencapai satu dokter untuk 10.417 penduduk. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan distribusi tenaga medis. Kedua aspek ini krusial agar implementasi program skrining kesehatan dapat mencapai tujuannya, yakni membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

## Atensi DPR

Berkaitan dengan rencana Kementerian Kesehatan untuk meluncurkan program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun, Komisi IX DPR RI perlu:

1. memastikan alokasi anggaran untuk program skrining kesehatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit digunakan secara efektif dan merata agar layanan menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia;
2. memastikan pemerintah untuk meningkatkan akreditasi Puskesmas di daerah terpencil guna memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan;
3. mendukung pelatihan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait penggunaan alat skrining kesehatan dan penyuluhan pencegahan PTM;
4. memastikan program tersosialisasi di seluruh Puskesmas dan rumah sakit, khususnya di daerah terpencil;
5. melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang dilakukan oleh pemerintah; dan
6. memastikan agar program berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

## Sumber

antaranews.com, 5 November 2024;  
health.detik.com, 6 November 2024;  
indonesia.go.id, 10 November 2024;  
kompas.com, 4 November 2024;  
mediaindonesia.com, 14 Oktober 2024; dan  
tempo.co, 29 Oktober 2024.



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

